

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMANFAATAN
SUMBER DAYA AIR BAWAH TANAH
DI KABUPATEN NIAS**

TESIS



Oleh

ARDIANSYAH LUBIS

NPM. 041801006

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2007**

ANALISIS KEBIJAKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR BAWAH TANAH DI KABUPATEN NIAS

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik (MAP)
Pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area



Oleh

ARDIANSYAH LUBIS

NPM. 041801006

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2007**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : **Analisis Kebijakan Pemanfaatan Sumber Daya Air Bawah Tanah Di Kabupaten Nias**

N a m a : Ardiansyah Lubis

N I M : 041801006



Pembimbing I

Prof. Dr. M. Arif Nst, MA

Pembimbing II

Ir. Endar Sutan Lubis, MS

Ketua Program Studi

Magister Administrasi Publik

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kariono'.

Drs. Kariono, MA

Direktur

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hari Kusmanto'.

Drs. Heri Kusmanto, MA

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Indetifikasi Masalah.....	8
1.3. Batasan Masalah.....	9
1.4. Perumusan Masalah.....	9
1.5. Tujuan Penelitian.....	10
1.6. Manfaat Hasil Penelitian.....	10
1.7. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II. KERANGKA KONSEPTUAL.....	13
2.1. Sifat Alamiah Air Bawah Tanah.....	13
2.2. Kebijakan Publik Dalam Pengelolaan Air Bawah Tanah.....	16
2.3. Definisi Operasional.....	22
BAB III. METODA PENELITIAN.....	33
3.1. Tahapan Penelitian.....	33
3.2. Lokasi dan Metode Pendataan.....	34
BAB IV. LINGKUP DAN RAGAM MASALAH KEBIJAKAN.....	39
4.1. Gambaran Umum.....	39

4.2. Kinerja Kebijakan Yang Saat Ini Dijalankan.....	44
4.3. FAKTOR – faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Implementasi Kebijakan...58	
4.4. Masalah Formal Kebijakan.....	64
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	67
B. Strategi Yang Direkomendasikan.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71



KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur senantiasa tercurah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Rahmat yang diberikan kepada kita sekalian sehingga penulisan tesis yang berjudul “**Analisa Kebijakan Pemanfaatan Sumber Daya Air Bawah Tanah Di Kabupaten Nias**” tepat pada waktunya.

Sadar sedalam-dalamnya tulisan ini senantiasa diliputi oleh kekurang sempurnaan oleh karena itu koreksi tesis ini akan penulis terima dengan senang hati.

Penulis menyadari, bahwa dalam melakukan penelitian dan penyelesaian tesis ini tidak akan selesai dengan baik tanpa bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak oleh karena itu, penulis dengan kerendahan hati menyempatkan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

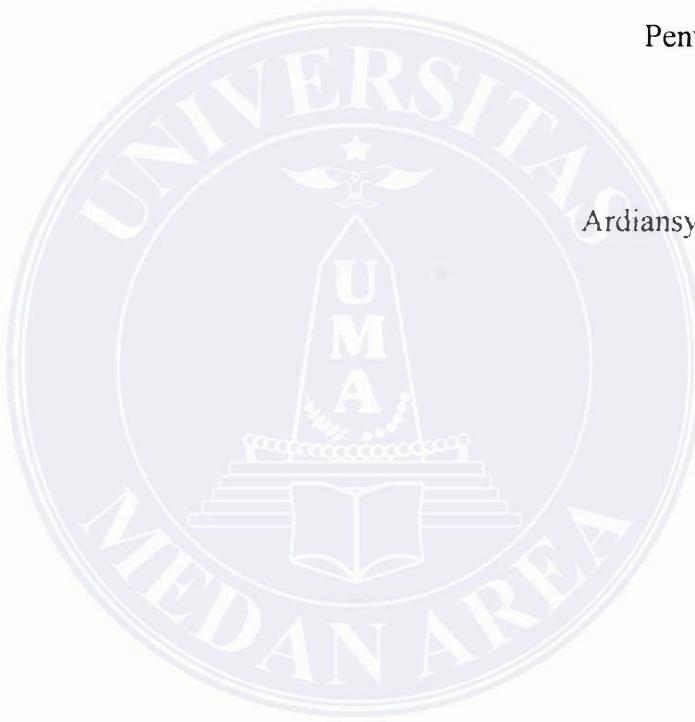
1. Bapak Drs. Heri Kusmanto, MA Selaku Direktur Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area.
2. Bapak Prof. DR. Muhammad Arif Nasution, MA Selaku pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan baik secara akademik maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
3. Bapak Ir. Sutan Endar Lubis, Msi Selaku pembimbing kedua atas segala bantuan, bimbingan dan sentuhan nilai-nilai ilmiah tiada henti.
4. Para informan dalam penelitian tesis ini, yang telah memberikan masukan berupa data yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
5. Ucapan terimakasih juga kepada para guru besar dan segenap staf administrasi Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area atas segala kemudahan dan bantuan lainnya selama penulis mengikuti pendidikan.
6. Seluruh rekan-rekan senasib seperjuangan atas saran dan kritikannya yang sangat membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada yang tak terhingga kepada Istri tercinta Siti Afrida serta Ayahanda tercinta H. Yan Gani Lubis dan ibunda tercinta Hj. Anizar Saya persembahan karya ini sebagai wujud penghargaan bagi mereka guna menunjukan betapa penderitaan dan pengorbanan mereka dalam menunjang keberhasilan penulis tidaklah sia-sia, semoga keberhasilan ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Pebruari 2007

Penulis,

Ardiansyah Lubis



BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Masalah

Air merupakan salah satu sumberdaya alam mempunyai peranan yang sangat vital dalam kehidupan umat manusia. Para pendiri Negara Republik Indonesia telah sepakat bahwa komoditas ini diatur oleh negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi :

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Dalam penjelasan pasal ini diungkapkan secara tegas bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan Negara atas sumberdaya alam, termasuk didalamnya air, dimaksudkan bahwa dalam pemanfaatannya, Negara memegang kekuasaan untuk mengatur dan menjamin keadilan kepada semua komponen bangsa.

Sumberdaya air yang dimanfaatkan untuk kehidupan dipisahkan atas dasar asal pengambilannya, yaitu; air permukaan dan air bawah tanah. Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2004, air permukaan didefinisikan sebagai air yang berada di atas permukaan bumi, tidak termasuk air laut. Sedangkan air bawah tanah (ABT) adalah air yang berada di perut bumi (baca = di dalam tanah/batuhan) termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.

Pemisahan keduanya semakin nyata ditinjau dari aspek pengelolaannya, karena ditangani oleh Instansi Pemerintah yang berbeda. Pengelolaan air permukaan

ditangani oleh Departemen Pekerjaan Umum yang secara teknis operasional berada pada Direktorat Jenderal Pengairan. Penanganan di Daerah secara dekonsentrasi dilakukan dalam satuan daerah aliran sungai (DAS). Sedangkan untuk pengelolaan air bawah tanah berada di bawah tanggungjawab Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, yang secara operasional ditangani oleh Direktur Geologi Tata Lingkungan. Operasional administratif di daerah diberikan wewenangnya kepada Gubernur Kepala Daerah melalui azas tugas pembantuan (“Medebewind”). Daerah Kabupaten/Kota, dalam rangka penyediaan air bersih bagi konsumsi penduduk, membentuk badan usaha milik daerah yang biasanya berupa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). PDAM dalam menjalankan fungsi distribusi tidak memandang asal sumber air, tetapi mementingkan ketersediaan air bersih bagi masyarakat.

Kebijakan pengelolaan air bawah tanah selama ini menjadi tanggung jawab Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, yang secara teknis dijalankan oleh Direktur Geologi Tata Lingkungan. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 03/P/M/Pertamben/1983 sebagian kewenangan administrasi air bawah tanah tersebut ditugaskan kepada Gubernur. Pemerintah Daerah Propinsi selanjutnya menetapkan Peraturan Daerah, seperti misalnya di Kabupaten Nias menetapkan Perda No. 5 Tahun 1985. Berbeda dengan tugas pembantuan yang lain, dalam bidang air bawah tanah ini daerah berwenang menetapkan peraturan daerah dan menarik retribusi seolah-olah seperti pelaksanaan urusan desentralisasi (otonom).

Sebagai tugas pembantuan, dalam melakukan pengelolaan air bawah tanah, khususnya dalam hal teknis, sangat tergantung kepada pusat. Seperti misalnya dalam perijinan, daerah belum dapat menerbitkan ijin pengeboran dan ijin pengambilan air

DAFTAR PUSTAKA

1. Ancok, Djamarudin, *Interaksi penduduk, lingkungan dan pembangunan, dalam Penduduk dan Pembangunan*, editor Agus Dwiyanto dkk. Yogyakarta : Aditya Media, 1996
2. Anonim, *Informasi Pengambilan Air Bawah Tanah di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah*, Proyek Penertiban dan Pengambilan Air Bawah Tanah, Dinas Pertambangan Propinsi Dati I Jawa Tengah, Tahun 1992-1993.
3. Anonim, *Undang-Undang Otonomi Daerah 1999 (UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 25 Tahun 1999 dan UU No. 28 Tahun 1999)*, Bandung : Kuraiko Pratama, 1999
4. Anonim, Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Tahun 2000
5. Bryson, John, M., "Strategic Planning For Public and Non Profit Organizations; A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement", San Fransisco : Jose-Bass Inc., 1988
6. Bappeda Propinsi Dati I Jawa Tengah dan Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah, *Jawa Tengah Dalam Angka (Central Java In Figures)*, Tahun 1998.
7. Bobrow. Davis.B, and Dryzek, John.S., *Policy Analysis by Design*, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1987
8. Djarwanto, *Mengenal Beberapa Uji Statistik Dalam Penelitian*, Cetakan I, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2001

9. Dye,R.,Thomas, "Understanding Public Policy", New Jersey : Prentice-Hall, Inc.,1972;
10. Dunn, William N., "Pengantar Analisis Kebijakan Publik (judul asli : An Introduction to Public Policy Analysis (1981)", Penyunting : Muhamd Darwin, Penerjemah Samodra Wibawa dkk., Edisi kedua, Cetakan keempat, Yogyakarta : Gajahmada University Press, 2000
11. Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral, Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451/K/10/MEM/2000 tentang *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tuga Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah*, Tahun 2000.
12. Ernst, John, Whose Utility ?: *The Social Impact of Public Utility Privatization and Regulation in Britain*, Buckingham - Philadelphia : Open University Press, 1994
13. Goggin, Malcolm L., et al, *Implementation Theory and Practice : Tward a third generation*, Glenview, Illinois, USA : Foresman and Company, 1990.
14. Hughes,E.,Owen, "Public Management and Administration", An Introduction, St. Martin's Press. plc.
15. Hoover, Kenneth.R.m, *Unsur-Unsur Pemikiran Ilmiah dalam Ilmu-Ilmu Sosial*, Alih Bahasa Hartono Hadikusumo, Yogyakarta : Tiara Wacana, 1989.
16. Ibrahim, Anwar, *Regional Development and Natural Resources, dalam Regional Development and Industrialization of Indonesia*, edited by Suryo Sudiono, Kunio Ibusa, TOKYO : Institute of developing Economies, 1992.

17. Knowles R., Wareing, 1981, J, *Economic and Social Geography*, Made Simple 4th revised ed, Great Britain : Clays Ltd, St Ives Musgrave, Richard A dan Musgrave Peggy B., *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*” (Judul Asli : Public Finance in Theory and Practice”, 1989, Alih Bahasa : Alfonso Sirait, Jakarta : Erlangga, 1991 Peters,B.,Guy' "American Public Policy : Process and Performance" ,New York : Franklin Watts. 1982.
18. Nogel, Stuart S. *Encyclopedia of police Studies*, Second editon, Revised and expanded, New York, Marcel Dekker Inc, 1994, P. 483-498, 499.
19. Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian, *Methode Penelitian Survey*, Cetakan II, Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 1995
20. Sudradjat, Adjat, *Teknologi dan Managemen Sumber Daya Mineral*, Bandung : Penerbit ITB, 1999.
21. Stiglitz, Joseph E., "Economic of The Public Sector", New York : W.W.Norton & Company, Inc. 1988.
22. Sugiyono, *Methode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta, 1992
23. Sutikno, Patterns of water resources utilization for domestic purposes in the Serayu River Basin (Desiertasi untuk memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Geografi) Yogyakarta : Gajahmada University, 1981.
24. Tjokrowinoto, Moeljarto, "Pembangunan : Dilema dan Tantangan", Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.

25. Todaro, Michael. P. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, alih bahasa Haris Munandar, Edisi 6, cetakan I, Jakarta : Erlangga, 1998.
26. U.S. Departement of the Interior Water and Power Resources Services, *Ground Water Manual : A Water Resources Technical Publication, A guide for Investigation, Development and management of ground-water resources*, New York, John Wiley & Sons, 1981.

